RESEARCH/REVIEW ARTICLE

POLITIK ANGGARAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH GUNA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI NTT (*Kajian Pustaka Sustainable Development Goals (SDGs)*)

BUDGETING POLITICAL BUDGET FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ACTION PLANS TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN NTT PROVINCE (Literature Review of Sustainable Development Goals (SDGs))

Abu Hasan El-Fuadi Sangaji^a

* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengkajian Daerah Provinsi NTT

* Corresponding author: Abu Hasan El-Fuadi Sangaji
E-mail: abuhasansangaji81@gmail.com

Naskah Diterima : 14 Desember 2019; Di-review : 23 Desember 2019; Dimuat: 30 Desember 2019

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2019

Abstract

The focus of this study is on how the Political Budget plays a role in the preparation of regional action plans to achieve sustainable development goals in the province of NTT, from the data obtained by almost all SKPD / PD NTT Province understands the regional action plans contained in the vision and mission of the Governor / Deputy Governor NTT, every SKPD / PD related to the Provincial mission includes the SKPD / PD focus and targets in the current year budgeting system, this proves that what the Governor conveyed through direct directives, interviews and statements at each meeting can be understood and carried out by each SKPD / PD in achieving goals NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Keywords Budget Politics / SDG's / Regional Action Plans

Abstrak

Fokus dari Kajian ini mengenai bagaimana Politik Anggaran memegang peranan dalam penyusunan rencana aksi daerah guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTT, dari data yang di peroleh hamper semua SKPD/PD Provinsi NTT memahami rencana aksi daerah yang tertuang dalam visi dan misi Gubernur/wakil Gubernur NTT, setiap SKPD/PD terkait misi Provinsi memasukkan sasaran dan target SKPD/PD nya kedalam sistim penganggaran tahun berjalan, hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan bapak Gubernur baik itu melalui arahan langsung, wawancara dan pernyataan pada setiap pertemuan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap SKPD/PD dalam mencapai tujuan NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Keywords Politik Anggaran / SDG's / Rencana Aksi Daerah

1. Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang mempunyai ciri khas kepulauan di mana Provinsi NTT mempunyai 1.192 pulau, sebanyak 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayahnya 2.47.931,54 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km².

Masih Banyaknya persoalan yang harus diselesaikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu bersaing dengan daerah lain, permasalahan pembangunan, adanya kesenjangan antara harapan dengan realisasi. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati, sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu, terutama wilayah yang menjadi prioritas pariwisata (ring of Beauty).

Masalah lainnya yang masih dihadapi Provinsi NTT adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di NTT pada tahun 2017 adalah sebesar 1.142.17 jiwa atau 21,35 persen, dari jumlah penduduk miskin tersebut NTT merupakan provinsi termiskin ke 3 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi kesejahteraan masyarakat lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM NTT yang masih berada jauh dibawah rata-rata IPM Indonesia. Kondisi IPM NTT tahun 2017 adalah sebesar 63,73 sementara IPM Indonesia adalah 70,81, tingginya angka Gizi buruk sampai minimnya berbagai fasilitas umum terlebih pada daerah Pariwisata.

Berbagai permasalahan tersebut bukannya tanpa solusi, dengan arah kebijakan Gubernur Provinsi NTT Periode 2018-2023 telah ditetapkan melalui visi RPJMD yaitu "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 merupakan

gambaran pernyataan kondisi yang di cita-citakan untuk terjadi pada tahun 2023. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut.

Untuk mengurai serta menyelesaikan permasalahan yang ada di seluruh wilayah Provinsi NTT, maka dibutuhkan desain perencanaan yang tepat sasaran, perencanaan sendiri pada tingkat daerah melekat pada perangkat daerah Bappeda/Bappelitbangda baik di Provinsi, Kab./Kota.

Salah satu penentu Pemerintah bisa bekerja secara baik dan benar adalah perencanaan berbasis data. Bappeda/Bappelitbangda diuntut untuk bisa memetakan potensi daerah secara tepat, harus mampu melihat peluang potensi daerah serta memetakan permasalahan yang ada dan di ikuti dengan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dalam beberapa kesempatan sebagai Gubernur NTT viktor laiskodat menyampaikan bahwa Bappeda/Bappelitbangda harus diisi oleh orang-orang pintar yang mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerinah Daerah Provinsi NTT guna mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, "*Perencana itu mesti oorang pintar, juga punya confidence, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, melihat masa depan yang luar biasa dan punya misi besar*" tegas viktor (Bataona, 2019).

Kabar gembira di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT tahun 2019 dimana melampaui target yang semula di targetkan sebesar 1,2 Triliun, sementara realisasinya sebesar 1,3 triliun, akan tetapi PAD tersebut tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan PAD Provinsi di wilayah Jawa yang rata-rata menerima PAD diatas 10 Triliun lebih. Pendapatan asli Darah sangat mempengaruhi anggaran belanja daerah itu sendiri, semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar pula anggaran belanja yang didapatkan pada tahun kedepan.

Oleh sebab itu, diperlukannya politik anggaran yang mana politik anggaran itu sebenarnya adalah cara pemerintah untuk menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat di gunakan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran. Maka dari itu, pentingnya suatu prioritas pembangunan karena pada akhirnya upaya membangun di sektor manapun juga tujuan akhirnya bisa meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun manusia menuju kesejahteraan rakyat.

Politik anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran karena terbatasnya sumberdana publik yang tersedia. Politik anggaran juga merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai

pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. Politik anggaran memegang peranan kunci dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah.

2. Kerangka Teori

Upaya mengidentifikasi permasalahan dalam kajian ini dengan menjabarkan beberapa konsep pemikiran yang berkaitan dengan tema kajian yang dilakukan, yaitu :

2.1 Politik Anggaran

Dilihat dari konsep dan prakteknya, proses penyusunan anggaran terdiri dari dua hal, yaitu perencanaan dan penganggaran (Iksan, M. 2012). Serta dari sifatnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada konsep penggunaan sumberdaya/dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan.

Pada lingkup Daerah, anggaran dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan proses perencanaan yang sangat penting dalam hal keuangan, karena anggaran akan menjadi pedoman dalam pengelola keuangan Negara atau daerah pada masa 1 (satu) tahun anggaran di mulai 1 Januari sampai 31 Desember atau suatu periode ke depan.

Anggaran merupakan aktivitas politik, baik proses maupun produk kerja adalah produk politik yang terkait siapa yang mendapat apa, siapa yang terlibat dan permasalahan serta konflik yang muncul dalam penyusunan anggaran, dalam prakteknya sendiri penganggaran sangat terkait dengan politik yaitu menyangkut posisi tawar (*bargaining*) antara berbagai kepentingan yang mempunyai wewenang untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak (*budgeting is power and politics*).

Politik Anggaran adalah proses memenuhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang saling berkepentingan ini juga mencakup penentuan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran karena terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

Politik Anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran karena terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Politik anggaran juga merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

2.2 Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana aksi (*Action Plan*) adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi-strategi dan arah pembangunan yang telah diidentifikasi dalam rencana strategis.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh; (17) Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Salah satu Kajian tentang politik Anggaran yang terfokus pada Konfigurasi aktor Politiknya (Baskoro, Ishack. 2015). Dimana dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa ada dua jenis aktor yang terlibat dalam proses penganggaran yaitu *insider actor* dan *outsider actor*, *insider actor* adalah aktor yang berada dalam Pemerintahan sedangkan *outsider actor* adalah aktor yang berada di luar Pemerintahan. Inilah yang kemudian paling berperan dalam proses Politik Anggaran.

Dari hasil penelitian diatas selaras dengan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs dalam melibatkan semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya. Para pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia terdiri dari empat platform, yakni: Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Organisasi Kemasyarakatan, Media dan Pelaku Usaha.

3. Metode

Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis (Embun, 2012).

Sumber data untuk penelitian/kajian studi pustaka dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital.

4. Hasil dan Pembahasan

RAD – pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan disusun Provinsi dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta melibatkan organisasi non Pemerintah (ormas, NSA/LSM, pelaku Usaha, akademisi, pakar, dll).

Terdapat keselarasan antara RPJMD 2019-2023 dengan tujuan SDG's 2015-2030, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.0
Keselarasan antara RPJMD 2019-2023 dengan Tujuan SDG's 2015-2030

Misi RPJMD 2019-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Tanpa Kelaparan : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 3 : Meningkatkan	Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan

ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan Yang Bertanggungjawab : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Ekosistem Laut : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk	Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan

mempercepat pembangunan	Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) terwujud dalam visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (inclusive) yakni melibatkan semua pihak (shareholders) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Gubernur Viktor Laiskodat sejak awal memang sangat getol tentang idenya untuk menjadikan NTT satu pasar Bersama, ide berlian ini didasarkan pada perhitungan sederhana bahwa, dengan adanya satu pasar Bersama di NTT, dimana antar daerah di NTT bisa saling supplay berbagai kebutuhan, maka deficit transaksi berjalan di NTT bisa ditekan dan kegoncangan ekonomi secara global atau Nasional tidak akan banyak berdampak di NTT.

Menurut Gubernur jika seluruh Kabupaten/Kota di NTT menciptakan pasar Bersama maka perputaran uang di dalam wilayah NTT akan meningkat tajam dan effecnya akan nyata bagi masyarakat. Semua orang atau kelompok juga UMKM dan unit usaha yang memiliki produk hasil inovasi, bisa disertifikasi

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi produk unggulan yang dijual ke Kabupaten/Kota lainnya di NTT. Bahkan, bisa untuk diekspor keluar dari NTT untuk memberikan pemasukan bagi daerah.

Dalam desain ekonomi NTT yang dibuat pemerintahannya, Gubernur Viktor menjelaskan, untuk mencapai mimpi NTT satu pasar dan menjadikan semua wilayah di NTT sebagai satu masyarakat ekonomi NTT (ME-NTT), maka cara yang digunakan pemerintah adalah melalui peningkatan keterpaduan antar sektor dan wilayah atas dasar kesamaan produk.

Gubernur NTT menegaskan, NTT adalah daerah yang hebat dengan produk dan komoditi-komoditi luar biasa, mulai dari bawang, cengkeh, ikan, fanili, mente, garam, rumput laut, jagung, padi dan lain sebagainya. Hanya saja, semua itu belum dikembangkan secara baik. Untuk itu, melalui masyarakat ekonomi NTT, semua bisa diperdagangkan di internal NTT sebagai satu pasar Bersama. *"kita harus menjadi produsen sekaligus konsumen, kita harus utamakan dulu kebutuhan didalam ilayah kita NTT, klo surplus baru ekspor keluar"* tegas Viktor Laiskodat.

Dalam mewujudkan masyarakat NTT yang sejahtera, mandiri dan adil, terdapat beberapa sektor yang mendukung perekonomian di Provinsi NTT, antara lain :

Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi NTT terdapat Kawasan industri, kawasan industri merupakan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri, untuk : a) mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; b) meningkatkan upaya pebangunan industri yang berwawasan lingkungan; c) meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan d) memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Dalam konteks pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur, kawasan industri yang akan dikembangkan dalam tahap awal adalah : 1) Kawasan Industri Bolok (Kabupaten Kupang), 2) Kawasan Industri Maurole (Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka) dan 3) Kawasan Industri Kanatang (Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya akan dikembangkan pula kawasan industri lainnya sesuai perkembangan pembangunan daerah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah.

Provinsi NTT juga menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi Ekonomi dan Kerja Sama dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoeonomi dan geostrategi

dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona : a) pengolahan ekspor; b) logistik; c) industri; d) pengembangan teknologi; e) pariwisata; f) energi; dan/atau g) ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja serta disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur, KEK yang dikembangkan adalah : 1) KEK Mbay (Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya), 2) KEK Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara dan sekitarnya), 3 KEK Melolo (Kabupaten Sumba Timur), dan 4) KEK Altaka (Kabupaten Alor, Lembata dan Flores Timur). Tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan KEK di wilayah /kabupaten lainnya sesuai perkembangan ekonomi daerah.

Hal berikut yang juga penting sebagaimana telah direncanakan Gubernur dan jajarannya dalam rangka mewujudkan masyarakat ekonomi NTT terbentuknya pusat produksi/ industri pengolahan Bersama lewat pengembangan *star-up* variasi bisnis ekonomi digital dalam suatu kesatuan E-Market Bersama NTT, serta pengembangan system kerja sama daerah, dukungan regulasi, asosiasi produk unggulan daerah, sumber daya manusia berkualitas, anggaran dan investasi.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor perindustrian dan Perdagangan;

1. Belum adanya data kelompok industri;
2. Komoditi sektor-sektor unggulan belum dikelola secara optimal untuk industri;
3. Belum memadainya ketersediaan SDM Industri yang kompeten dan bersertifikat;
4. Pembangunan industri provinsi belum dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah :
 - a. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan kelor dan pakan ternak;
 - b. Pengembangan industri garam daerah;
 - c. Peningkatan nilai dan volume ekspor melalui Skema Kerjasama Perdagangan Selatan Selatan;
 - d. Peningkatan produksi produk unggulan daerah untuk kebutuhan regional, nasional dan ekspor melalui penggunaan iptek dan inovasi.
2. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas :

Peningkatan distribusi dan jaringan pemasaranserta promosi produk unggulan daerah melalui peningkatan daya saing dengan mengoptimalkan peranan stakeholder lintas sektor termasuk didalamnya PD. Flobamora, PT. JAMKRIDA, KI. Bolok dan BLUD SPAM.

Pertanian dan Peternakan.

Salah satu penyebab tingginya pengangguran dan kemiskinan di NTT adalah akibat dari masih kecilnya pergerakan ekonomi dari sektor lahan. *“selama ini arahan dari pimpinan tidak menggerakkan seluruh potensi lahan kering yang ada, karena itu pengangguran ada, kedepan akan kami dorong dengan baik. Langkah kongkritnya untuk pertanian lahan kering akan didorong untuk multicultural, kami serius pada multikultur karena itu sawah tidak ada yang tertarik. Program Nasional kan seluruh jagung, padi dan kedelai, tidak cocok dengan NTT”*. Imbuh Viktor.

Selain mengoptimalkan potensi pariwisata, juga focus pada produksi pertanian dan peternakan di provinsi NTT yang dikenal dengan identitas Provinsi kepulauan itu. Sebagai Provinsi yang mempunyai lahan tidur sangat besar, karena secara geografis, Provinsi NTT terdiri dari 1.192 pulau, di mana terdapat 432 dan 42 pulau yang berpenghuni yang punya lahan tidur sangat luas.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor pertanian, antara lain :

1. Kepemilikan lahan petani yang kecil (rata-rata dibawah 0,5 ha) Berdampak pada daya saing produksi dan harga,;
2. Kurangnya ketersediaan air;
3. Penggunaan Saprodi (benih unggul, pupuk) dan alsintan yang belum optimal;
5. Adanya serangan OPT dan Penyakit;
6. Kurangnya akses jalan produksi dan rusaknya jaringan irigasi;
7. Perubahan iklim global / kekeringan yang berkepanjangan.

Sedangkan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor Peternakan, antara lain :

1. Sistem pemeliharaan sebagian besar masih non insentif;
2. Konsumsi protein hewani masyarakat Nusa Tenggara Timormasih berada di bawah norma gizi nasional;
3. Pada musim kemarau yang panjang setiap tahun, kualitas dan kuantitas rumput sebagai pakan ternak menurun secara drastis, sehingga tingkat kondisi ternak yang sudah tercapai pada akhir musim hujan akan menurun kembali selama musim kemarau;
4. Tingkat kematian ternak masih cukup tinggi terutama untuk ternak anak;
5. Belum berperan secara optimal kelembagaan petani ternak.

Dinas Pertanian.

Dinas Pertanian menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan;
2. Peningkatan Ketercukupan dan aksesibilitas pangan;
3. Peningkatan Keamanan Pangan masyarakat;
4. Peningkatan kualitas konsumsi Pangan;
5. Peningkatan jumlah produksi pertanian;
6. Peningkatan produksi dan pasca produksi marungga.

Dinas Peternakan.

Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang.

Pembangunan sub sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni : 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak.

Dinas Peternakan menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan, yaitu :

1. Meningkatnya populasi ternak besar;
Klasterisasi wilayah pengembangan ternak besar berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktifitas ternak besar serta Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Meningkatnya populasi ternak kecil;
Klasterisasi wilayah pengembangan ternak kecil berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktifitas ternak kecil serta Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran .
3. Meningkatnya populasi unggas;
Klasterisasi wilayah pengembangan ternak unggas berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktifitas ternak unggas serta Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Meningkatnya produksi pakan ternak;

Klasterisasi wilayah pengembangan pakan ternak untuk mendorong peningkatan produksi pakan ternak serta Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan yang lebih luas untuk mendorong investasi industri pakan ternak .

5. Meningkatnya populasi peternakan di Pariwisata Estate;
Menguatkan pembinaan dan pengawasan veteriner dalam rangka penjaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak yang ASUH.
6. Meningkatnya proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk.
Meningkatkan fasilitasi, pembinaan dan supervisi terhadap usahatani ternak serta usaha pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak .

Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty).

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

Pernyataan paling berani yang disampaikan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat "*Kedepan Provinsi NTT ini bukan bersaing dengan Provinsi-Provinsi lain, tapi kalau kelas Viktor Laiskodat turun di NTT maka kelasnya harus bersaing dengan Negara sebelah seperti Republik Timor Leste, Australia, Newzeland, Fiji, Vanuatu, Tonga, itu yang akan kita lawan*" (Bataona, 2019).

Keberanian untuk menyatakan tekad menjadikan NTT sebagai daerah yang mampu bersaing dengan Negara di Kawasan Pasific Selatan ini bukan hanya pernyataan kosong tanpa argumentasi, hal ini dilihat dari posisi geografis yang strategis di antara Negara-Negara Pasific Selatan yang mana sangat dimungkinkan untuk perdagangan lintas Negara.

Terdapat tiga poin penting dalam wujud program aksi yang akan dilakukan, yaitu : (1) membuka jalur penerbangan langsung ke Australia dan Selandia Baru, (2) meningkatkan promosi pariwisata pada tingkat domestik dan mancanegara, (3) memperkenalkan secara gencar produk khas NTT sebagai ikon pariwisata NTT antara lain, pesta pasola, Komodo dragon, danau kelimutu, tenun ikat.

"*Pariwisata NTT itu ibarat cewek cantik dari pulau semau, ciri-ciri gadis itu tinggi badan 170cm, rambut hitam, bibir tipis dan betis berisi, dia luar biasa tapi jarang mandi, jarang sikat gigi, jarang pake shampoo sehingga tidak ada Kepala Dinas yang mau termasuk Kades juga tidak mau, kenapa?*"

Karena cewek itu bau dan tidak mengurus diri. Tibatiba ada seseorang yang datang dan mengajak cewek itu ke Jakarta, disana dia merawat diri, dilatih berbahasa Inggris dan berbudaya yang baik, dua tahun kemudian dia kembali ke NTT. Ketika sampai di bandara El-tari semua orang akan bertanya-tanya, siapa itu? Nah, itulah pariwisata". Demikian analogi yang diberikan Gubernur NTT tentang potensi pariwisata di NTT yang luar biasa.

Analogi diatas mungkin membuat sebagian orang tertawa lucu, akan tetapi tidak bagi perangkat daerah, yang mana analogi dari Gubernur NTT tersebut menjadi cambuk bagi setiap perangkat daerah dalam menata ulang benang kusut pariwisata di NTT.

Pemerintah Daerah Provinsi NTT periode 2018-2023 menjadikan Pariwisata sebagai Penggerak Utama pembangunan NTT, Pariwisata diandaikan sebagai lokomotif yang diyakini memiliki daya ungkit sekaligus daya tarik yang mampu menarik gerbong pembangunan ekonomi masyarakat menuju sejahtera, maka dalam konteks Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, semua sektor harus secara bersama-sama mendukung pembangunan pariwisata. Konsep Pembangunan dari sektor terkait, harus dirancang memenuhi cita rasa pariwisata, dan memenuhi kebutuhan pariwisata.

Potensi pariwisata di sangat merata di seluruh wilayah yang ada di provinsi NTT, hal ini dapat dilihat dari gambar seperti dibawah ini :

Gambar 1.0
Potensi Pariwisata Di Provinsi NTT

Dari sekian banyak potensi wisata, pemerintah daerah provinsi NTT menetapkan 7 destinasi unggulan yang menjadi prioritas pembangunan, ke 7 destinasi unggulan itu antara lain :

1. Desa Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki atraksi wisata alam Air Terjun Oehala yang bertingkat-tingkat. Selain itu ada Kilo 12 yang mempunyai lokasi pemandangan lembah yang indah.
2. Kampung Adat Lamalera, Kabupaten Lembata yang memiliki keunikan sistem kekerabatan dan desa nelayan yang bertahan hingga kini. Atraksi wisata andalannya adalah perburuan paus yang sangat terkenal itu.

3. Mulut Seribu, di Kabupaten Rote Ndao yang memiliki objek wisata bahari yang menampilkan keindahan pemandangan alam gugusan pulau-pulau kecil. Selain menyaksikan panorama alam tempat ini sangat bagus untuk lokasi memancing, mendayung, snorkeling, dan diving.
4. Pantai Liman yang terletak di Pulau Semau, di Kabupaten Kupang yang bisa ditempuh 30 menit perjalanan dengan perahu motor dari daratan Timor. Destinasi ini memiliki keindahan pantai alami dengan pasir putih bersih yang potensial dikembangkan dengan berbagai atraksi wisata.
5. Desa Kaonara, Kabupaten Ende yang menjadi salah satu desa penyangga Kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan danau tiga warna. Desa ini juga memiliki panorama alam eksotik dan situs rumah adat unik.
6. Desa Wolwal, Kabupaten Alor yang memiliki tiga potensi yakni gunung, laut, dan pantai yang memungkinkan dikembangkan menjadi wisata alam dan ekowisata yang memikat.
7. Desa Pramadita, Kabupaten Sumba Timur yang sangat kental suasana adat istiadat dan memiliki bangunan unik yakni rumah adat beratap tinggi dan lancip serupa dengan menara yang banyak menyimpan benda-benda pusaka (Tunggu Merapu).

Terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata ini, antara lain:

1. Kurangnya pagelaran atraksi seni budaya daerah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan produk seni budaya agar bernilai ekonomis;
2. Rendahnya Aksesibilitas :
a) Terbatasnya moda transportasi
b) Ketidakpastian jadwal penerbangan
3. Terbatasnya Infrastruktur, antara lain : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dll.
4. Terbatasnya sarana/prasarana pendukung objek : Hotel/ Restoran, BPW, Guide, Sarana hiburan, dll
5. Relatif masih rendahnya kualitas SDM sektor kepariwisataan. Secara umum HDI NTT ranking 31 Nasional (2017).
6. Terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah, terutama ke pasar wisata potensial.
7. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya;
8. Pengolahan industri di Pariwisata Estate.

Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah melahirkan sebuah *Grand Design* menuju pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. dalam *action plan* tersebut pemerintah NTT sudah memiliki beberapa program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait di level Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memajukan pariwisata di NTT.

Dari ke 7 permasalahan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa SKPD/PD yang menangani langsung permasalahan utama dalam pelaksanaan

pembangunan pariwisata ini, hal tersebut tercantum dalam sasaran Rensra SKPD/PD terkait pariwisata, diantaranya :

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan pada poin 1,5,6, yaitu :

1. Untuk permasalahan pagelaran atraksi seni budaya daerah maka dicapai melalui sasaran :
 - a) Tersedianya / teridentifikasinya daya Tarik / kawasan wisata (terutama bahari) yang akan dikembangkan dan menjadi destinasi unggulan masing-masing kab/kota dan menjadi icon daerah;
 - b) teridentifikasinya skala event/atraksi wisata baik core, major maupun supporting event;
 - c) Terlaksananya berbagai event/atraksi wisata sebagai hiburan umum;
 - d) Terlaksananya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha kepariwisataan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk permasalahan terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah dapat dicapai melalui sasaran :
 - a) meningkatnya jumlah kunjungan :
 - wisatawan Mancanegara = 300.000 – 500.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal (LOS) = 3 – 4 hari dan pengeluaran = rp. US\$ 100 – US\$ 150 per hari;;
 - wisatawan Nusantara = 500.000 – 800.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal 2 – 4 hari dan pengeluaran = rp. 250.000 – rp. 500.000 per hari;
 - b) meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - c) teridentifikasinya kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT.
3. Untuk permasalahan meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan, kemitraan, kelembagaan dan profesionalisme usaha kepariwisataan, dapat dicapai melalui sasaran :
 - a) terwujudnya pelayanan kebudayaan dan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi pelayanan publik;
 - b) terwujudnya kerjasama antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
 - c) terciptanya kreativitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan terutama pembudayaan sapta pesona.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan pada poin 3, yaitu :

1. Untuk permasalahan Terbatasnya Infrastruktur, antara lain : jalan, air bersih, listrik,

telekomunikasi, dll, dapat dicapai melalui sasaran :

- a) Ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 pariwisata estate;

Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan pada poin 2, yaitu :

1. Untuk permasalahan Rendahnya Aksesibilitas; yang mencakup terbatasnya moda transportasi dan ketidak pastian jadwal penerbangan, dapat dicapai melalui sasaran :
 - a) Ketersediaan trayek angkutan umum di tourisme estate;
 - b) Ketersedian fasilitas perlengkapan jalan ke Tourism Estate.

Dalam *Grand Design* juga mengatur agar Kabupaten/Kota di Provinsi NTT akan saling mendukung dalam kegiatan pariwisata, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana akibat ego wilayah, masing-masing wilayah bertarung sendiri tanpa memikirkan kerjasama dengan daerah lainnya di Provinsi NTT.

Grand Design pariwisata inilah yang menjadi kebijakan Politik anggaran gubernur Viktor Laiskodat dalam mempengaruhi atau menyatukan setiap Kabupaten/Kota terkoneksi dengan ide-ide pemerintah Provinsi dalam pengembangan pariwisata di NTT.

Dalam sektor pariwisata, terdapat 7 wisata unggulan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi NTT, itu artinya terdapat 7 daerah Kabupaten yang menjadi (*prime mover*) penggerak utama pariwisata di Provinsi NTT, maka seharusnya sektor pariwisata dijadikan keutamaan dalam penganggaran.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menentukan sasaran guna mencapai tujuan penyelesaian permasalahan, yaitu :

1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah (*prime mover*) :
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata Estate;
 - b. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB di Kawasan Pariwisata Estate;
 - c. Peningkatan pemasaran produk dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dikawasan Pariwisata Estate;
 - d. Memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan penting serta produk unggulan daerah antar daerah di Kawasan Pariwisata estate melalui akses pelayaran laut yang melingkari 3 ring of beauty;
 - e. Peningkatan Kapasitas usaha masyarakat di kawasan pariwisata estate melalui mendetakan start-up.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Provinsi NTT menghadapi Masalah aksesibilitas dan infrastruktur yang masih minim, ditambah masalah klasik soal kecilnya dukungan fiskal atau anggaran. Salah satu fakta yang mendera NTT sejak lama adalah kenyataan bahwa, NTT adalah provinsi dengan APBD yang kecil, baik untuk APBD Provinsi atau Kab./Kota. Karena itu, siapa pun yang memimpin NTT akan dihadapkan pada masalah-masalah mendasar ini.

5. Kesimpulan

Dalam kajian ini dapat di ungkapkan bahwa politik anggaran memiliki peranan penting dalam terciptanya tujuan rencana aksi daerah.

Sistem penganggaran lama dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku politik anggaran yang mengakibatkan tidak tepan sasaran dalam pengalokasian anggaran, dengan kharisma dan keberanian Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengarahkan dan mempengaruhi seluruh elemen dalam mendukung kebijakan beliau dinilai positif, hal ini terbukti dari target dan sasaran setiap SKPD/PD mampu memahami arahan bapak gubernur.

Kabar gembira di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT tahun 2019 dimana melampaui target yang semula di targetkan sebesar 1,2 Triliun, sementara realisasinya sebesar 1,3 triliun,

Daftar Pustaka

Embun, B. (2012, April 17). Banjir Embun. etrieved from Penelitian Kepustakaan: <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>

Ishak, Baskoro wicaksono, *Konfigurasi Politik Lokal : Studi Politik Keuangan Daerah di Kota Pekan Baru, Tahun 2011-2014*. Vol. 2, November 2015, Universitas Riau.

Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat).

Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

<https://kupang.tribunnews.com/2020/01/05/pad-ntt-2019-lampaui-target-simak-penjelasan-kepala-bpad-ntt-zeth-sonny-libing>

<https://kupang.tribunnews.com/2020/01/06/pad-ntt-lampaui-target-dprd-ntt-beri-apresiasi>

<https://kupang.tribunnews.com/2019/01/11/penjelasan-bppkad-mengenai-apbd-ntt-tahun-2019>

<https://nttbangkit.com/gubernur-ntt-serius-kembangkan-7-destinasi-wisata-baru-ntt/>

RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Rensra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rensra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rensra Dinas Peternakan

Rensra Dinas Pertanian

Rensra Dinas Perhubungan

Rensra Dinas PUPR

Materi Arah Kebijakan Gubernur & Wakil Gubernur_Wantimpres

Materi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan